



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

S A L I N A N

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.32/Kep.040.Bappeda/2010

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 188.32/2943/PMD tanggal 24 Juli 2009 perihal Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 188.32/3493/PMD tanggal 3 September 2009 perihal Implementasi Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dimana guna meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung.
 - c. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bandung sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Bandung di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengkoordinasian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengkoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota Bandung.

KEENAM...

- KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.32/Kep.040.Bappeda/2010
TANGGAL : 11 Januari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Bidang Koordinasi Perencanaan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pelaksanaan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
1. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi
- Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Data dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala...

4. Kepala Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

2. Kelompok Kerja

Pengembangan Kemitraan

Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

3. Kelompok Kerja

Pengaduan Masyarakat

Ketua : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala...

2. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pemberdayaan pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Koordinator Kelompok Program I : Asisten Administrasi Perekonomian dan Bidang Perlindungan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bantuan Sosial Bandung.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
7. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
9. Ketua Badan Amil Zakat Kota Bandung;
10. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung.

Koordinator Kelompok Program II : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Anggota...

- Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
8. Ketua Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
9. Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Koordinator Kelompok Program III Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

7. Direktur...

7. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar
Bermartabat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.32/Kep.040.Bappeda/2010

TANGGAL : 11 Januari 2010

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Melakukan pembinaan, meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung.
- Ketua : Mengkoordinasikan kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- Wakil Ketua Bidang Koordinasi Perencanaan : 1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Bandung di bidang penanggulangan kemiskinan;
2. Mengkoordinasikan forum SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja SKPD dan penyusunan rancangan RKPD Kota Bandung.
- Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pelaksanaan : 1. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
2. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan.

Sekretaris...

- Sekretaris dan Wakil Sekretaris : Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
1. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung dalam mengelola data dan sistem informasi kemiskinan.
2. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung dalam mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- Kelompok Program I Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial : Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial.
- Kelompok Program II Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat.

Kelompok...

Kelompok Program III
Bidang Pemberdayaan Usaha
Mikro dan Kecil

: Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007